

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis data pada bab IV dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis rasio kemandirian keuangan daerah, tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi pada tahun 2011-2014 bisa dikatakan masih cukup rendah karena nilai rasio kemandirian keuangan kedua kota tersebut masih tergolong pola hubungan instruktif. Kemandirian keuangan Kota Payakumbuh dengan rata-rata rasio kemandirian 11,79% dinilai lebih baik jika dibandingkan dengan Kota Bukittinggi yang memiliki rata-rata 11,46%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Payakumbuh lebih mampu memanfaatkan sumber PAD dibandingkan dengan Kota Bukittinggi.
2. Berdasarkan rasio efektivitas penerimaan PAD pada periode 2011-2014, tingkat efektivitas penerimaan PAD Kota Payakumbuh memiliki rata-rata 104,55% (sangat efektif) lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Bukittinggi dengan rata-rata 98,96% (efektif), sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Payakumbuh lebih efektif dalam menjalankan tugasnya untuk merealisasikan penerimaan PAD yang dianggarkan dibanding dengan Kota Bukittinggi.
3. Berdasarkan rasio pertumbuhan PAD pada tahun 2011-2014 Pertumbuhan PAD Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh selalu bernilai positif setiap tahunnya yang berarti bahwa perekonomian kedua kota tersebut mengalami

perkembangan yang cukup baik. Tingkat pertumbuhan PAD Kota Payakumbuh dengan rata-rata 28,77% lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Bukittinggi dengan rata-rata 13,61%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penerimaan PAD kota Payakumbuh lebih baik dibandingkan Kota Bukittinggi walaupun kedua daerah mengalami pertumbuhan positif setiap tahunnya.

4. Berdasarkan rasio share PAD terhadap belanja, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata rasio share PAD Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Jika dilihat dari perbandingannya, peran PAD Kota Bukittinggi yang memiliki rata-rata 10,07% lebih rendah dari Kota Payakumbuh yang memiliki rata-rata 10,83% yang berarti Kota Payakumbuh dinilai lebih baik dibandingkan Kota Bukittinggi dalam menggunakan PAD untuk membiayai belanja daerahnya.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Objek Penelitian hanya terbatas pada Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh.
2. Penelitian ini terbatas pada pengamatan data APBD dan Realisasi APBD Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh tahun 2011-2014.
3. Penelitian ini terbatas pada penggunaan analisis rasio keuangan berupa rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas penerimaan PAD, rasio pertumbuhan PAD, dan rasio share PAD terhadap belanja daerah.

4. Penelitian ini tidak mempertimbangkan keadaan sosial, ekonomi dan politik pada daerah yang menjadi objek penelitian.

5.3. Saran

1. Bagi Pemerintah Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh:
 - a. Untuk pemerintah Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh diharapkan dapat menambah sumber pendapatan daerah yang baru agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan.
 - b. Rata-rata efektivitas penerimaan PAD Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh tinggi maka diharapkan pada pemerintah daerah agar bisa mempertahankan atau lebih meningkatkan target penerimaan PAD.
 - c. Tingkat efektivitas penerimaan PAD kota yang tinggi seharusnya diimbangi dengan tingkat pertumbuhan PAD Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh, sehingga diharapkan agar pemerintah Kota mampu mempertahankan bahkan meningkatkan penerimaan PAD setiap tahunnya dengan memanfaatkan setiap potensi pada komponen PAD.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Penelitian selanjutnya dapat memperluas penelitiannya dengan meneliti seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan indikator penilaian kinerja yang lebih kompleks.
 - c. Peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan data kuantitatif saja namun juga dapat menggunakan data kualitatif dalam menilai kinerja daerah.